



# DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOVEN DIGOEL



## Tahun Anggaran 2023

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena Atas Berkat dan Kasih-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel Tahun 2023 telah selesai disusun. LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel ini disusun dalam rangka mewujudkan Clean Government / manajemen pemerintah yang bersih, transparan dan berorientasi pada hasil yang akan dinikmati oleh Masyarakat.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel berpedoman pada PP Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Kewajiban melaporkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Rview atas Pelaporan Kinerja. Sehubungan dengan hal itu dalam menyusun LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel Tahun 2023 diupayakan tetap mengacu pada RENSTRA tahun 2021- 2025. Berdasarkan RENSTRA tersebut selanjutnya dirumuskan program dan kegiatan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan.

Selain dari pada itu Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) juga merupakan sarana bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel Untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders Instansi Pemerintah Pusat/Daerah dan Masyarakat sebagai bahan evaluasi kedalam atas pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel yang digunakan sebagai umpan balik bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel yang senantiasa tetap berupaya meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Boven Digoel yang di jabarkan ke dalam Visi dan Misi Dinas KOMINFO Kabupaten Boven Digoel.

Demikian penyusunan LAKIP Dinas KOMINFO Kabupaten Boven Digoel ini semoga dapat bermanfaat sebagai salah satu laporan yang di gunakan sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi sampai sejauh mana kinerja Aparatur KOMINFO demi peningkatan kinerja di tahun yang akan datang dan melalui laporan ini diharapkan pencapaian kinerja KOMINFO dapat lebih di tingkatkan baik melalui perbaikan pelaksanaan tugas maupun melalui penyempurnaan perencanaan kinerja KOMINFO Kabupaten Boven Digoel.

Tanah Merah, Januari 2024

Plt. Kepala Dinas  
Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Boven Digoel

MARIA PAYUNGLANGI, S.Sos  
Pembina  
NIP.19721210 200605 2 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya tahun anggaran 2023 yang melibatkan seluruh Bidang dan Bagian pada DISKOMINFO Kabupaten Boven Digoel. Capaian kinerja diukur berdasarkan perbandingan antara Target kinerja yang diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja dengan hasil pengukuran kinerja.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Telah di tetapkan Sebagai penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Boven Digoel, maka tujuan organisasi Dinas KOMINFO jangka waktu 5 (Lima) tahun kedepan dalam pencapaian Visi dan Misi tersebut adalah :

1. Percepatan infrastruktur Jaringan Internet Pemerintah Intra Pemerintah yang menghubungkan Pemerintah Kabupaten dengan Distrik dan Kampung mendukung Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pusat Data (Data Center / Distarter Recovery Cente;
2. Pengelolaan dan pengembangan Portal Web Site Kabupaten Boven Digoel dalam implementasi SPBE.;
3. Implementasi Pola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
4. Data Sectoral Statistik Daerah terintegrasi menuju Satu Data Boven Digoel, mendukung perencanaan pembangunan.
5. Penguatan komunikasi yang efektif dengan dukungan pemanfaatan tekhnologi informasi dan komunikasi.
6. Peningkatan Pelayanan Informasi dan komunikasi publik..
7. Penerapan persandian negara pada strategi sistem keamanan data dan informasi.
8. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang professional di Bidang Komunikasi dan Informatika.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka di susunlah RPJMD Dinas KOMINFO yang didalamnya terdapat program kerja tahunan, pelaksanaan kegiatan Dinas KOMINFO Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2023 dibiayai dari DPA Dinas KOMINFO sebesar Rp.13.481.333.603

Dari 4 program yang terdiri dari 11 Kegiatan yang direncanakan dan di tetapkan target kinerjanya dalam rencana kerja tahun 2023 dapat di kemukakan capaian outcome sasaran strategis mencapai 98.1% yaitu capaian indikator kinerja program :

Ringkasan capaian indikator kinerja program tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel capaian indikator kinerja**

NO	PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.	8	24	94 %
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik .	1	4	100%
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1	3	100 %
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1	1	100%
Capaian outcome sasaran strategis Tahun 2023 Berdasarkan Capaian 4 Program yang Terdiri dari 11 kegiatan				99 %

Dalam melaksanakan tugas –tugas umum pemerintahan daerah yang berkaitan dengan peran dan fungsi komunikasi dan informasi, Persandian dan Statistik terdapat beberapa hambatan-hambatan antara lain :

1. Terbatasnya kemampuan / kompetensi SDM Aparatur bidang komunikasi dan informasi dalam melaksanakan tugas – tugas yang bersifat teknis dibidang informasi dan teknologi (IT).
2. Belum adanya Grand Design yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan, pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan komunikasi.
3. Kondisi geografis daerah kabupaten boven digoel mempengaruhi tingkat kesulitan dalam melaksanakan tugas terutama dalam pengembangan jaringan telekomunikasi, menyebabkan diperlukannya ketersediaan dana yang memadai.
4. Belum maksimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam pembangunan bidang komunikasi dan informatika di kabupaten boven digoel

*Untuk mengatasi hambatan-hambatan diatas maka kiranya dukungan dari pimpinan daerah sangat diharapkan.*

Rencana kerja yang terarah merupakan pedoman ataupun acuan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dilingkungan Dinas KOMINFO Kabupaten Boven Digoel.

Tanah Merah, Januari 2024

Plt. Kepala Dinas  
Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Boven Digoel

MARIA PAYUNGLANGI, S.Sos  
Pembina  
NIP 19721210 200605 2 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KAVER</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	
<b>DAFTAR GAMBAR DAN DIAGRAM</b> .....	
<b>BAB. I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas dan Fungsi Dinas.....	2
1.3 Struktur Organisasi .....	17
1.4 SDM KOMINFO .....	18
1.5 Aspek Strategis dan Isu Strategis .....	22
1.6 Sistematika Laporan .....	24
<b>BAB. II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1. Rencana Kinerja Tahun 2023.....	25
A. Visi dan Misi .....	25
B. Tujuan dan Sasaran.....	36
C. Strategi dan Kebijakan.....	41
2.2. Program .....	47
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	48
<b>BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	53
3.2. Analisis Efisiensi Pengguna Sumber Daya.....	57
3.3. Akuntabilitas Kinerja ( <i>persentase</i> ).....	65
<b>BAB. IV PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	67
4.2. Saran.....	67

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat daerah lainnya.

Sesuai dengan TAP MPR XI / 98 dan UU No. 28 Tahun 1999 menjelaskan bahwa setiap program dan kegiatan dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Perpres 29 / 2014 merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan target kinerja yang ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik. PP No.8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. PermenPAN-RB No.53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. PermenPAN-RB No.12 tahun 2015 tentang pedoman Evaluasi SAKIP.

Lakip Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel merupakan laporan pertanggungjawaban Kinerja OPD kepada Bupati Boven Digoel sesuai Susunan Organisasi, tugas pokok fungsi dan tata kerja Dinas yang diatur oleh Peraturan Bupati Boven Digoel No.63 Tahun 2016 adalah Membantu sebagian tugas Bupati dalam memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik.

Dengan penyusunan LAKIP ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah bidang komunikasi dan informatika ,Persandian dan Statistik akan berjalan lebih efektif dan efisien, yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

## 1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Boven Digoel berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sedangkan Susunan Organisasi Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, dan Tata kerja dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 63 Tahun 2016, yaitu melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah yang meliputi hubungan pemberdayaan potensi informasi baik langsung maupun melalui media.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Kewenangan di bidang Komunikasi dan Informatika;
- b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program di bidang Hubungan Masyarakat, Pemberdayaan Informasi dan Ketelematikaan;
- c. Menyusun rencana dan program Komunikasi dan Informatika;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan TIK serta Pengembangan TIK;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan informasi melalui pemberdayaan potensi Kelompok Informasi Masyarakat, Pengumpulan Data Informasi dan Penyebaran Informasi;
- f. pelaksanaan kerja sama telekomunikasi informasi dan dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan aspek telematika sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- g. Pelaksanakan Pameran dan promosi potensi daerah;
- h. Pelaksanakan peliputan dan pendokumentasian informasi;
- i. Pelaksanaan Pengolaan Informasi melalui media;
- j. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika;
- k. Mengelola sistem informasi dan pengembangannya serta penerapan teknologi;
- l. Pembinaan dan Pelaksanaan Komunikasi dan Informatika;
- m. Pelaksanaan Tugas Penyelenggaraan pemerintahan sesuai bidang komunikasi dan informatika.
- n. Pelaksanakan urusan ketatausaan;
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, dijabarkan sebagai berikut :

### **a. Kepala Dinas**

#### **❖ Tugas Pokok :**

Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas bupati dalam memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik.

#### **❖ Fungsi :**

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **b. Sekretaris**

#### **❖ Tugas Pokok :**

Mempunyai Tugas Pokok membantu sebagian tugas kepala dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan ke sekretariat yang meliputi pengkoordinasi penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

#### **❖ Fungsi :**

- a. Merumuskan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- b. Merumuskan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas - tugas bidang secara terpadu;
- c. Merumuskan kebijakan pelayanan administratif dinas;
- d. Merumuskan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
- e. Merumuskan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
- f. Merumuskan pengkoordinasian pembuatan standart operasional prosedur (SOP) dan standart pelayanan minimal (SPM) dinas;
- g. Merumuskan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. Merumuskan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan dan aset dinas;

- i. Merumuskan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas.

#### **b.1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan**

##### **❖ Tugas Pokok :**

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, Mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas sekretaris dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana, program kerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan Aset Dinas;

##### **❖ Fungsi :**

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana, program kerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional kegiatan dan program kerja Dinas;
- c. Melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan LAKIP serta penyiapan bahan bahan LPPD Dinas;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan perundang – undangan penunjang pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- f. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
- g. Melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
- h. Merencanakan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
- i. Melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- k. Mengkoordinasikan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;

- l. Melaksanakan konsultasi penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas;
- m. Melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
- n. Melaksanakan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Dinas;
- o. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- p. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi penyusunan rencana, program kerja dan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

## **b.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

### **❖ Tugas Pokok :**

Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas sekretaris dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian dinas.

### **❖ Fungsi :**

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian;
- b. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat – surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan;
- c. Melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
- d. Melaksanakan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dinas;
- e. Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Dinas;
- f. Melaksanakan, penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
- g. Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat – rapat dinas;
- h. Melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat;
- i. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;

- j. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;
- k. Melaksanakan perencanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan dinas;
- l. Menyusun bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Dinas;
- m. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang – undangan;
- n. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- o. Menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan formasi dinas;
- p. Menyusun dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, BPJS dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- q. Menyusun dan menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti pendidikan / pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- r. Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
- s. Menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi cuti pegawai;
- t. Pelaksanaan penyusunan administrasi DUK, sumpah/janji pegawai;
- u. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- v. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

### **c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

#### **❖ Tugas Pokok :**

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

❖ **Fungsi :**

- a. Perumusan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- b. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkungan pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkungan pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, menyediakan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten;
- d. Menyiapkan penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteri penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintahan daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, menyediakan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten;
- e. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan superfisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, menyediakan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, menyediakan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- g. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

**c.1. Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

❖ **Tugas Pokok :**

Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan komunikasi publik;

❖ **Fungsi :**

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan Informasi dan komunikasi publik;
- b. Melaksanakan perencanaan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. Melaksanakan pengolahan Opini dan Aspirasi Publik;
- d. Melaksanakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);
- e. Melaksanakan pengumpulan pendapat umum (survey, jajak pendapat) dan pengolahan aduan masyarakat di kabupaten;
- f. Melaksanakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
- g. Melaksanakan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah;
- h. Melaksanakan pengolahan informasi publik untuk keterbukaan informasi dan pelayanan informasi publik di kabupaten;
- i. Pelaksanaan penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan Term of Reference (TOR) pengelolaan informasi dan komunikasi publik ;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. Pelaksanaan koordinasi koordinasi dan konsultasi pelayanan pengelolaan komunikasi publik dengan sub unit kerja lain dilingkungan Dinas;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

**c.2. Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik**

❖ **Tugas Pokok :**

Kepala Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dibidang kemitraan informasi dan komunikasi publik;

❖ **Fungsi :**

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan kemitraan informasi dan komunikasi publik;
- b. Pelaksanaan pelayanan kemitraan informasi dan komunikasi publik;
- c. Menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik;
- d. Pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
- e. Pelaksanaan pembuatan konten lokal;
- f. Pengelolaan saluran komunikasi milik pemda/media internal ;
- g. Pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemda dan non pemda;

- h. Penyusunan standar operasional dan prosedur (sop) dan tor pengelolaan informasi publik ;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelayanan kemitraan informasi dan komunikasi publik dengan sub unit kerja lain dilingkungan dinas ;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

**d. Bidang Penyelenggaraan e-Government,**

❖ **Tugas Pokok :**

Bidang Penyelenggaraan e-Government, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas pokok kepala dinas dalam memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas dibidang penyelenggaraan e-Government yang meliputi Infrastruktur teknologi, pengembangan aplikasi serta keamanan informasi telekomunikasi.

❖ **Fungsi :**

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Penyelenggaraan e-Government;
- b. Perumusan kebijakan penyelenggaraan e-Government ;
- c. Perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) dan TIK Pemerintah Daerah, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan sistim keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi pemerintah daerah ;
- d. Penyusunan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) dan TIK Pemerintah Daerah, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan sistim keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi pemerintah daerah;
- e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) dan TIK Pemerintah Daerah, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan,

layanan sistem keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi pemerintah daerah;

- f. Memantau, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) dan TIK Pemerintah Daerah, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan sistem keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi pemerintah daerah;
- g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan e-Government;
- h. Melaksanakan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang penyelenggaraan e-Government;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

#### **d.1.Seksi Infrastruktur Teknologi dan Keamanan Informasi Telekomunikasi**

##### **❖ Tugas Pokok :**

Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas dibidang layanan komunikasi dan informatika.

##### **❖ Fungsi :**

- a. Penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Perumusan kebijakan di bidang pelayanan informasi publik ;
- c. Perumusan kebijakan di bidang layanan kehumasan ;
- d. Perumusan kebijakan di bidang penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
- e. Perumusan kebijakan di bidang layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
- f. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya tik pemerintah kabupaten dan masyarakat ;
- g. Penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) pemerintah kabupaten;
- h. Penyelenggaraan ekosistem tik smart city;
- i. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;

- j. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang layanan komunikasi dan informatika ;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;

## **d.2. Seksi Pengembangan Aplikasi**

### **❖ Tugas Pokok :**

Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengembangan aplikasi ;

### **❖ Fungsi :**

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pengembangan aplikasi ;
- b. Melaksanakan rumusan kebijakan dibidang pengelolaan, pelayanan, pengendalian pengembangan aplikasi;
- c. Melaksanakan rumusan kebijakan pembuatan dan pengembangan master plan pengembangan aplikasi daerah;
- d. Melaksanakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi;
- e. Melaksanakan layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
- f. Menetapkan standar format data dan informasi, validasi dan kebijakan;
- g. Melaksanakan layanan recovery data dan informasi;
- h. Melaksanakan layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
- i. Melaksanakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik;
- j. Melaksanakan layanan interoperabilitas;
- k. Melaksanakan pelayanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;
- l. Pelaksanaan pelayanan pusat *application programm interface* (api) daerah;
- m. Penyusunan standar operasional dan prosedur (sop) dan tor seksi pengembangan aplikasi;
- n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- o. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan sub unit kerja lain dilingkungan dinas;
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

## **e. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika**

### **❖ Tugas pokok :**

Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas dibidang layanan komunikasi dan informatika;

### **❖ Fungsi :**

- a. Penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Perumusan kebijakan di bidang pelayanan informasi publik ;
- c. Perumusan kebijakan di bidang layanan kehumasan ;
- d. Perumusan kebijakan di bidang penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
- e. Perumusan kebijakan di bidang layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
- f. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya tik pemerintah kabupaten dan masyarakat ;
- g. Penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) pemerintah kabupaten;
- h. Penyelenggaraan ekosistem tik smart city;
- i. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- j. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang layanan komunikasi dan informatika ;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas ;

## **e.1. Seksi Kehumasan dan Layanan Informasi**

### **❖ Tugas Pokok :**

Kepala Seksi Kehumasan dan Layanan Informasi mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang kehumasan dan layanan informasi;

### **❖ Fungsi :**

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan kehumasan dan layanan informasi;
- b. pelaksanaan rumusan kebijakan di bidang pelayanan kehumasan dan layanan informasi;
- c. pelaksanaan pengklasifikasian dan inventarisasi informasi publik;
- d. pelaksanaan pelayanan informasi publik untuk Implementasi UU KIP;

- e. pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat ;
- f. pelaksanaan pengelolaan hubungan dengan media (*media relations*);
- g. pelaksanaan penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (*briefing notes, press release, backgrounders*) ;
- h. pelaksanaan pelayanan fasilitasi juru bicara Pemerintah Daerah;
- i. penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan TOR seksi kehumasan dan layanan informasi ;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. pelaksanaan koordinasi pelayanan dengan sub unit lain di lingkungan dinas;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

## **e.2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Layanan Publik dan Tata Kelola e-Government.**

### **❖ Tugas Pokok :**

Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Layanan Publik dan Tata Kelola e-Government mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan sumber daya dan layanan publik :

### **❖ Fungsi :**

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya dan layanan publik Tata Kelola e-Government;
- b. Melaksanakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- c. Menyelenggarakan *Government Chief Information Officer* (GCIO) serta penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City* di kabupaten;
- d. Melaksanakan pengembangan sumber daya komunikasi publik;
- e. Melaksanakan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;
- f. Menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- g. Melaksanakan layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten;
- h. Melaksanakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dlm pengelolaan domain, Portal dan website, menetapkan dan mengubah

nama pejabat domain, menetapkan dan mengubah nama domain dan sub domain, menetapkan tata kelola nama domain dan sub domain;

- i. Menetapkan dan merubah nama pejabat domain;
- j. Melaksanaan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;
- k. Melaksanaan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Government dan *Smartcity*;
- l. Pelaksanaan layanan implementasi e-Government dan *Smartcity* ;
- m. Pelaksanaan promosi pemanfaatan layanan smartcity di Kabupaten;
- n. Melaksanakan layanan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government kabupaten;
- o. Melaksanakan layanan koordinasi kerjasama lintas organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non Pemerintah;
- p. Melaksanakan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah daerah;
- q. Melaksanakan pengembangan *Busines Proses Re-engineering* pelayanan di lingkup pemerintahan dan non pemerintahan ( Stakeholder Smart City);
- r. Melaksanakan layanan Sistem Informasi *Smart City*;
- s. Melaksanakan layanan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian *smart City*;
- t. Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan TOR seksi pengelolaan sumber daya dan layanan publik Tata Kelola e-Government;
- u. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- v. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas;
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

**f. Bidang Persandian dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang**

❖ **Tugas Pokok :**

Kepala Bidang Persandian dan Statistik, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas dibidang persandian dan statistik;

❖ **Fungsi:**

- a. Perumusan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan bidang Persandian dan Statistik;

- b. Perumusan kebijakan dibidang pelayanan dan pengelolaan persandian dan statistik;
- c. Perumusan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten;
- d. Perumusan pelaksanaan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten;
- e. Perumusan penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup daerah kabupaten;
- f. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

#### f.1. Seksi Persandian

##### ❖ Tugas Pokok

Kepala Seksi Persandian, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan persandian;

##### ❖ Fungsi :

- a. Perumusan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan bidang Persandian;
- b. Perumusan kebijakan dibidang Persandian;
- c. Perumusan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten;
- d. Perumusan pelaksanaan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten;
- e. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

#### f.2. Seksi Statistik.

##### ❖ Tugas Pokok :

Kepala Seksi Statistik, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan statistik;

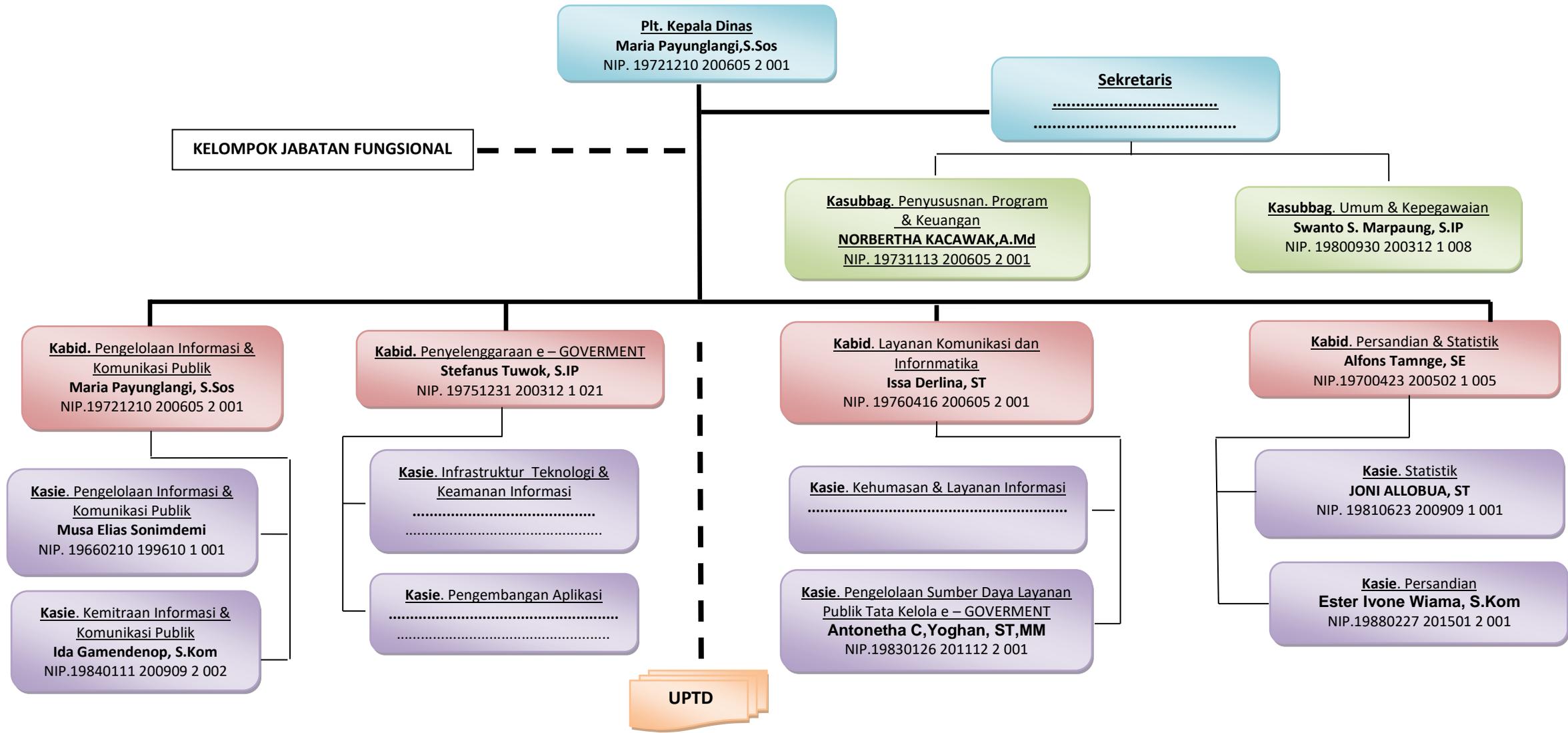
##### ❖ Fungsi :

- a. Perumusan penyusunan rencana dan program kerja dibidang pengelolaan dan pelayanan statistik;
- b. Perumusan kebijakan dibidang statistik;
- c. Perumusan penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup daerah kabupaten;
- d. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

### 1.3 Struktur Organisasi

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOVEN DIGOEL



## 1.4. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

### 1.4.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia sebagai faktor kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 65 orang dengan rincian sebagai berikut :

#### a. Komposisi Status Kepegawaian :

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Prosentase
1	PNS	33 orang	(56 %)
2	Honorer	32 orang	(44%)
	<b>Jumlah</b>	<b>65 orang</b>	<b>(100 %)</b>

#### b. Komposisi Jabatan PNS

No.	Jabatan PNS	Jumlah	Prosentase
1	Jabatan Struktural	11 orang	(100%)
3	Jabatan Fungsional Umum	2 orang	(0%)
	<b>Jumlah</b>	<b>13 orang</b>	<b>(100%)</b>

#### c. Komposisi Eselon PNS :

No.	Eselon PNS	Jumlah	Prosentase
1	Eselon II.a	0 orang	(0%)
2	Eselon III.a	0 orang	(0%)
3	Eselon III.b	4 orang	(8%)
4	Eselon IV.a	0 orang	(0%)
5	Eselon IV.b	7 orang	(17%)
6	Staf	22 orang	(75%)
	<b>Jumlah</b>	<b>33 orang</b>	<b>(100%)</b>

d. Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang Tahun 2023

No	Uraian	Golongan I					Golongan II					Golongan III					Golongan IV					Grand
		a	b	c	d	Jml	a	b	c	d	Jml	a	b	c	d	Jml	a	b	c	d	Jml	
1	Kepala Dinas																					
2	Sekretariat							2	1		3	1	1	2		4						7
3	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik						1		1		2	1			2	3	1				1	6
4	Bidang Penyelenggaraan e-Government								2		2	3			1	4						6
5	Bidang Layanan Komunikasi dan Informasi						1				1	2	1		1	4	1				1	6
6	Bidang Persandian dan Statistik						1		1	1	3	2		1	1	4	1				1	8
7	<b>Jumlah</b>						<b>3</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>3</b>					<b>3</b>	<b>33</b>

e. Komposisi Pendidikan PNS :

No.	Pendidikan PNS	Jumlah	Prosentase
1	SLTP	0 orang	(0%)
2	SLTA	13 orang	(45%)
3	D III	4 orang	(5%)
4	S 1	15 orang	(48%)
5	S2	1 orang	(2 %)
	<b>Jumlah</b>	<b>33 orang</b>	<b>(100%)</b>

f. Komposisi Pendidikan Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak) :

No.	Pendidikan Pegawai Tidak Tetap	Jumlah	Prosentase
1	SLTA	24 orang	(76%)
2	D III	3 orang	(8 %)
3	S 1	4 orang	(12 %)
4	S 2	1 orang	(4%)
	<b>Jumlah</b>	<b>32 orang</b>	<b>(100%)</b>

g. Komposisi Umur PNS :

No.	Umur PNS	Jumlah	Prosentase
1	< 25 th	-	
2	25 – 30 th	1 orang	(4%)
3	31 – 40 th	17 orang	(61%)
4	41 – 50 th	9 orang	(17%)
5	51 – 55 th	4 orang	(12%)
6	> 56 th	2 orang	( 6%)
	<b>Jumlah</b>	<b>33 orang</b>	<b>(100%)</b>

h. Data pegawai menurut Gender :

No.	Pegawai menurut gender	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	18 orang	(70%)
2	Perempuan	15 orang	(30%)
	<b>Jumlah</b>	<b>33 orang</b>	<b>(100%)</b>

i. Pegawai Dinas Kominfo Kab. Boven Digoel yang diperbantukan :

No.	Pegawai	Jumlah

#### 1.4.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

1. Gedung Kantor dalam memberikan pelayanan bidang komunikasi dan informatika.
2. Room Server dan Room Kendali Server (Data Center/Distarter Recovery Center).
3. Asset 9 Tower Telekomunikasi yang mendukung Jaringan Internet WiFi Interkoneksi antar OPD Se-Kabupaten Boven Digoel dengan ISP PT.TELKOM Indonesia.
4. Jaringan Internet Kabel Fiber Optik yang menginterkoneksi antar OPD Se-Kabupaten Boven Digoel dengan ISP PT.TELKOM Indonesia.
5. Continue dukungan Kapasitas 300 Mbps Bandwidth Dedicated CIR 1:1 yang di share ke semua OPD.
6. Mengelola Portal Web Site Kabupaten Boven Digoel dengan nama Domain Utama : [www.bovendigoelkab.go.id](http://www.bovendigoelkab.go.id), dan Sub-Domain OPD serta Sub-Domain Aplikasi e-Government.
7. Room Layanan Virtual Teleconference dan dukungan peralatan Studio

8. Dokumen Data Sektoral Statistik Kabupaten Boven Digoel Tiap tahun.
9. Layanan Kehumasan.
10. Sumber Daya Manusia Aparatur Bidang TIK dan beberapa Komputer/Laptop Operasional dan penunjang Alat Tulis Kantor Inventaris Kantor yang tersedia.
11. Kendaraan Bermotor
  - ❖ Mobil Dinas jabatan : 1 Buah
  - ❖ Mobil Operasional Hilux : 1 Buah (rusak berat)
  - ❖ Mobil Siaran Pustaka : 1 buah (Baik)
  - ❖ Sepeda motor : 16 Buah
12. Teknologi Informasi dan Komunikasi
  - ❖ Room Server (Pusat Data) sudah dilengkapi dengan : 2 Unit Rack Server 45u Indorack, 3 unit AC Pendingin, 1 Unit UPS, 1 Unit Router Microtik CCR, 1 Unit Switch Hub Management, dll, yang mendukung Jaringan Internet Radio WiFi dan Jaringan Internet Fiber Optik di 36 OPD.
  - ❖ Beberapa titik yang telah terpasang dan operasional Radio SSB mendukung telekomunikasi antar Kabupaten dan Distrik Se-Kabupaten Boven Digoel.
  - ❖ Beberapa Hardware yang dibutuhkan dalam penerapan teknologi informatika.
  - ❖ Beberapa Software berlisensi dan tidak, yang mendukung Operasional di Komputer/Laptop.
  - ❖ Server Web masih menggunakan jasa web hosting dari [www.ardhosting.com](http://www.ardhosting.com) untuk mendukung portal website Kabupaten Boven Digoel dengan nama domain [www.bovendigoelkab.go.id](http://www.bovendigoelkab.go.id). bekerjasama dengan Pihak YES Yogyakarta.
  - ❖ Bantuan 36 BTS Telepon Seluler dari BAKTI-KEMKOMINFO RI yang tersebar di Distrik dan Kampung.
  - ❖ Bantuan 27 Akses Internet dari BAKTI-KEMKOMINFO RI yang tersebar di Balai Kampung dan Sekolah-Sekolah.
  - ❖ Bantuan 3 Desa Broadband Terpadu di Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, Kampung Getentiri, Distrik Jair dan Kampung Mindiptanah Distrik Mindiptanah.

Sumber daya pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang **Ekstern**, antara lain :

### **1. Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat**

- ❖ Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai mitra pemerintah dalam penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya sebagai penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Sampai Tahun 2023 jumlah KIM telah mencapai 10 kelompok yang tersebar di 6 Distrik.

### **2. Sumber Daya Media Massa Elektronik dan Cetak.**

- ❖ Kerja sama dengan lembaga penyiaran televisi
- ❖ Kerja sama BAKOHUMAS (Dialog Interaktif) dengan LPP RRI Boven Digoel.
- ❖ Buletin Suara Boven Digoel.
- ❖ Media Massa Cetak seperti Surat Kabar, Tabloid dan Majalah, perlukan kerjasama dengan media cetak, baik surat kabar harian, mingguan maupun majalah dan tabloid yang tersebar di kabupaten Boven Digoel, walaupun Dinas Komunikasi dan Informatika sudah memiliki Buletin Suara Boven Digoel yang akan ditingkatkan Kualitasnya.

## **1.5 Aspek Strategis Dan Isu Strategis**

Dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025, dan memperhatikan Arah kebijakan pemerintah pusat dan Renstra KEMKOMINFO dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, maka kontribusi sesuai dengan peran dan kewenangan fungsi dan tugasnya di Bidang Urusan Komunikasi dan Informasi yang dipercepat pemenuhannya sebagai program prioritas nasional pada masa pandemi Covid-19 ini, memosisikan sebagai leading sector di Bidang Komunikasi dan Informatika.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan, tantangan serta potensi di bidang komunikasi dan informatika, maka isu strategis yang berkembang pada saat ini, dimasa pandemi Covid-19 serta berpengaruh terhadap tugas-tugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel, yaitu :

1. Masyarakat kurang optimal mengakses sarana dan prasarana telekomunikasi dan informasi di Kabupaten Boven Digoel, karena kapasitas yang terbatas dan layanan operator seluler yang tidak selalu stabil untuk Layanan GSM ataupun Komunikasi Data, dan ketersediaan logistik serta kemampuan daya beli masyarakat, dengan jumlah pengguna telephone seluler yang kian meningkat dan sudah mulai memanfaatkan Infrastruktur TIK.
2. Keterbatasan kesiapan infrastruktur layanan IndiHOME dan WiFi.ID untuk akses telekomunikasi dan informasi publik di tempat-tempat pusat layanan umum dan peribadatan.
3. Transformasi digitalisasi layanan pemerintah ke dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-Government) belum terintegrasi dengan kelayakan Pusat Data (Data Center/Data Recovery Center).
4. Jaringan Internet Interkoneksi Pemerintah Intra Pemerintah belum terhubung ke Distrik dan Kampung mendukung Implementasi SPBE.
5. Ketersediaan SDM Bidang TIK yang profesional dan bersertifikat SKKNI tidak tersedia, serta terbatasnya dukungan SDM Aparatur untuk tata kelola SPBE.
6. Diseminasi informasi dan komunikasi publik yang belum optimal karena dukungan sarana dan prasarana serta SDM Aparatur yang belum memadai.
7. Pengelolaan Web Site Kabupaten Boven Digoel dengan Nama Domain Utama [www.bovendigoelkab.go.id](http://www.bovendigoelkab.go.id) dan Sub Domain OPD yang belum optimal dalam pengembangan Sub Domain OPD dan Sub Domain Aplikasi e-Government, serta kurangnya peran OPD yang mendukung tata kelola SPBE (e-Government).
8. Pelaksanaan koordinasi antar OPD yang kurang maksimal dalam rangka kelancaran layanan bahan komunikasi dan naskah sambutan Pimpinan Daerah.
9. Sistem manajemen pengelolaan data statistik sektoral yang belum optimal karena kurangnya dukungan dokumentasi data yang up to date dari OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, dan belum dapat mengoptimalisasi Aplikasi Sistem Informasi Data Statistik Sektoral.
10. Pelaksanaan tata kelola persandian yang belum optimal untuk keamanan isu-isu strategis daerah, karena kurangnya koordinasi dan komunikasi lintas sektoral.

## 1.6 Sistematika Laporan

Adapun sistematika pelaporan LAKIP Dinas KOMINFO Kabupaten Boven Digoel Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

### **BAB I. Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Lakip OPD yang meliputi Latar Belakang, Tugas dan Fungsi Unit Kerja, Struktur Organisasi, SDM, Aspek Strategis dan Isu Strategis dan Sistematika Laporan.

### **BAB II. Perencanaan Kinerja**

Bab ini memuat perencanaan kinerja lakip Dinas KOMINFO tahun 2023 yang meliputi Renstra yang dimana memuat (Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan dan Indikator Kinerja disertai dengan Tabel), Program serta Perjanjian Kinerja yang terdiri dari ( Isi perjanjian Kinerja dan disertai dengan tabel)

### **BAB III. Akuntabilitas Kinerja**

Bab ini memuat Akuntabilitas Kinerja yang terdiri dari Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Anggaran Dan Akuntabilitas Kinerja

### **BAB IV. Penutup**

Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan secara umum tentang keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Strategis serta Strategis Pemecahan masalah.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja merupakan hasil yang akan dicapai Dinas KOMINFO Kabupaten Boven Digoel selama satu Tahun Anggaran. Rencana Kinerja ini ditetapkan sebagai implementasi dan perencanaan strategis dengan tetap mempertimbangkan perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi dan tetap berpedoman pada beberapa kebijakan pemerintah pusat dengan tidak mengurangi esensi perencanaan strategis yang telah dikemukakan diatas.

Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan dari penetapan Renstra tahun 2023 maka Dinas KOMINFO Kabupaten Boven Digoel menetapkan target untuk masing-masing program yang harus dicapai. Target itu dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT). Target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja baik untuk program maupun kegiatan.

#### A. Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel.

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke arah mana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's*.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yang tertuang dalam RPJMD 2021-2025 Kabupaten Boven Digoel, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel, juga menuangkan dan menetapkan Visi dan Misinya untuk tahun 2021-2025 adalah :

***“ Terwujudnya Boven Digoel yang bersatu, sejahtera dan berdaya saing di kawasan perbatasan papua selatan berbasis pertanian, pariwisata dan perikanan.”***

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel adalah :

**Tabel 2.1 Visi, Misi , Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan**

<p>Visi : Terwujudnya Boven Digoel yang bersatu, sejahtera dan berdaya saing di kawasan perbatasan papua selatan berbasis pertanian, pariwisata dan perikanan.</p>			
<p>Misi ke-1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berkarakter dan berdayasaing.</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Percepatan infrastruktur Jaringan Internet Pemerintah Intra Pemerintah yang menghubungkan Pemerintah Kabupaten dengan Distrik dan Kampung mendukung Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pusat Data (Data Center / Distarter Recovery Center).</p>	<p>Tersedianya infrastruktur Jaringan Internet Pemerintah Intra Pemerintah interkoneksi 36 OPD.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan sinergitas antar OPD di Bidang Pendidikan dan Kesehatan berbasis elektronik dengan pemanfaatan e-Learning dan e-Government.</li> <li>2. Memperkuat penyediaan akses internet di sekolah-sekolah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengalokasikan anggaran percepatan pembangunan infrastruktur Jaringan Internet Pemerintah Intra Pemerintah interkoneksi 36 OPD.</li> <li>2. Mengusulkan ke BAKTI-KEMKOMINFO pengadaan dan penambahan kapasitas Akses Internet di Sekolah-Sekolah.</li> </ol>
	<p>Tersedianya infrastruktur Jaringan Internet Pemerintah Intra Pemerintah di 19 Distrik dan 112 Kampung.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan sinergitas antar OPD di Bidang Pendidikan dan kesehatan berbasis elektronik dengan pemanfaatan e-Learning dan e-Government.</li> <li>2. Memperkuat penyediaan akses internet di sekolah-sekolah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengalokasikan anggaran percepatan pembangunan infrastruktur Jaringan Internet Pemerintah Intra Pemerintah interkoneksi 19 Distrik dan 112 Kampung.</li> <li>2. Mengusulkan ke BAKTI-KEMKOMINFO pengadaan dan penambahan kapasitas Akses Internet di Sekolah-Sekolah.</li> </ol>
<p>Pengelolaan dan pengembangan Portal Web Site Kabupaten Boven</p>	<p>Rutinitas ketersediaan pembiayaan domain dan web</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keaktifan Domain Web Site sebagai Media Info</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberi Kualitas Layanan OPD Bidang Pendidikan</li> </ol>

Digoel dalam implementasi SPBE.	hosting serta Data Statis pada Web Site Kabupaten Boven Digoel.	Pemerintah untuk mengakses e-Government, terutama layanan OPD Bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat. 2. Memperkaya konten-konten layanan pendidikan di OPD Bidang Pendidikan	dalam Web Site.  2. Bersinergi dengan OPD Bidang Pendidikan untuk konten-konten layanan pendidikan yang berkualitas.
Data Sectoral Statistik Daerah terintegrasi menuju Satu Data Boven Digoel, mendukung perencanaan pembangunan.	Dokumen Data Sektoral Statistik Daerah setiap tahun.	1. Pemanfaatan Data Sektoral Statistik Daerah untuk mengetahui Pendidikan di Kabupaten Boven Digoel dan membuat perencanaan.	1. Bersinergi dengan Wali Data OPD dalam pengumpulan dan pengolahan data secara rutin setiap tahunnya. 2. Mengalokasikan anggaran pembuatan dokumen dan digital pengumpulan dan pengolahan data statistik sektoral daerah setiap tahunnya.
Pengembangan SDM Bidang TIK	Pengembangan SDM Aparatur Bidang TIK	Peningkatan Jumlah SDM Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan Bidang TIK.	Mengalokasikan anggaran rutin pelatihan SDM Aparatur Bidang TIK.
	Pengembangan SDM dalam Ekonomi Creative	Peningkatan Jumlah SDM Masyarakat Pemberdayaan Ekonomi Kreative (e-Commercs)	Mengalokasikan anggaran rutin pelatihan SDM Masyarakat Pemberdayaan Ekonomi Kreative ke arah Pelaku Usaha StartUp.

Misi ke-2 : Mengembangkan perekonomian inklusif berbasis sumber daya pertanian, perikanan dan pariwisata yang kompetitif.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Percepatan infrastruktur Jaringan Internet Pemerintah Intra Pemerintah yang menghubungkan Pemerintah Kabupaten dengan Distrik dan Kampung mendukung Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pusat Data (Data Center / Distarter Recovery Center).	Tersedianya infrastruktur Jaringan Internet Pemerintah Intra Pemerintah interkoneksi 36 OPD.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan sinergitas antar OPD di Bidang Pertanian, Perikanan, Kepariwisata, dll berbasis elektronik dengan pemanfaatan e-Learning, e-Commers dan e-Government.</li> <li>2. Meningkatkan literasi Pemanfaatan Infrastruktur TIK kearah Pemberdayaan Ekonomy Creative.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengalokasikan anggaran percepatan pembangunan infrastruktur Jaringan Internet Pemerintah Intra Pemerintah interkoneksi 36 OPD.</li> <li>2. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).</li> <li>3. Mengusulkan ke BAKTI-KEMKOMINFO pengadaan dan penguatan kapasitas Akses Internet dan BTS Telephone Seluler di Kabupaten Boven Digoel.</li> <li>4. Mengalokasikan anggaran bersinergi dengan Distrik dan Kampung serta Lintas Sektoral dengan OPD terkait melaksanakan sosialisasi, pelatihan, workshop, dll untuk memotivasi para pelaku usaha baik perorangan, kelompok hingga UMKM dapat meningkat</li> </ol>

			menjadi StartUp Daerah dengan mengelola potensi di centra-centra produksi menjadi komoditas unggulan daerah.
	Tersedianya infrastruktur Jaringan Internet Pemerintah Intra Pemerintah di 19 Distrik dan 112 Kampung.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan sinergitas antar OPD di Bidang Pertanian, Perikanan dan Kepariwisataan berbasis elektronik dengan pemanfaatan e-Learning, e-Commercs dan e-Government dengan Pemerintah Distrik dan Kampung.</li> <li>2. Meningkatkan lierasi Pemanfaatan Infrastruktur TIK kearah Pemberdayaan Ekonomy Creative.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengalokasikan anggaran percepatan pembangunan infrastruktur Jaringan Internet Pemerintah Intra Pemerintah interkoneksi 19 Distrik dan 112 Kampung.</li> <li>2. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menghubungkan Distrik dan Kampung.</li> <li>3. Mengusulkan ke BAKTI-KEMKOMINFO pengadaan dan penguatan kapasitas Akses Internet dan BTS Telephone Seluler di Kabupaten Boven Digoel.</li> <li>4. Mengalokasikan anggaran bersinergi dengan Distrik dan Kampung serta Lintas Sektoral dengan OPD terkait melaksanakan sosialisasi, pelatihan,</li> </ol>

			<p>workshop, dll untuk memotivasi para pelaku usaha baik perorangan, kelompok hingga UMKM dapat meningkat menjadi StartUp Daerah dengan mengelola potensi di centra-centra produksi menjadi komoditas unggulan daerah.</p> <p>5. Memanfaatkan penjualan market place dari StartUp/Unicorn Indonesia serta Internet Of Things (IoT) dengan menggunakan teknologi informatika.</p>
<p>Pengelolaan dan pengembangan Portal Web Site Kabupaten Boven Digoel dalam implementasi SPBE.</p>	<p>Rutinitas ketersediaan pembiayaan domain dan web hosting serta Data Statis pada Web Site Kabupaten Boven Digoel.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keaktifan Domain Layanan Web Site sebagai Media Info Pemerintah untuk mengakses e-Government, terutama layanan OPD Bidang Pertanian, Perikanan dan Kepariwisata.</li> <li>2. Menggunakan Web Site Kabupaten Boven Digoel dari Level-Informatif, Interaksi,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan domain Web Site Kab. Boven Digoel.</li> <li>2. Implementasi SPBE dengan Layanan OPD memanfaatkan Web Site secara optimal.</li> <li>3. Bersinergi dengan OPD terkait untuk mempromosikan potensi daerah di Web Site dengan Data dan Informasi ataupun visualisasi, membantu mendatangkan investor.</li> <li>4. Bersinergi dengan pelaku</li> </ol>

		Transaksional hingga terintegrasi.	usaha dan OPD terkait untuk menjual mempromosi produk-produk unggulan yang berkualitas.
Data Sectoral Statistik Daerah terintegrasi menuju Satu Data Boven Digoel, mendukung perencanaan pembangunan.	Dokumen Data Sektoral Statistik Daerah setiap tahun.	1. Pemanfaatan Data Sektoral Statistik Daerah untuk mengetahui potensi-potensi daerah yang dapat dikembangkan ke arah komoditas unggulan dan membuat perencanaan pembangunan.	1. Bersinergi dengan Wali Data OPD dalam pengumpulan dan pengolahan data secara rutin setiap tahunnya, terutama terkait potensi daerah di bidang pertanian, perikanan dan kepariwisataan. 2. Mengalokasikan anggaran pembuatan dokumen dan digital pengumpulan dan pengolahan data statistik sektoral daerah setiap tahunnya.

<p>Peningkatan Pelayanan Informasi dan komunikasi publik.</p>	<p>Layanan informasi dan komunikasi publik</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan layanan data dan informasi kepada masyarakat yang bersifat edukatif.</li> <li>2. Memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi informatika untuk layanan komunikasi publik.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan desiminasi informasi dan komunikasi publik.</li> <li>2. Memberikan layanan melalui media informasi milik pemerintah.</li> <li>3. Mengalokasikan anggaran layanan peliputan dan reportasi progres pengelolaan potensi daerah menjadi produk unggulan secara virtual dan dokumentasi digital di centra-centra produksi.</li> <li>4. Mengalokasikan anggaran pembinaan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang mengelola potensi Pertanian, Perikanan dan Kepariwisataaan.</li> </ol>
<p>Misi ke-3 : Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar pada masyarakat secara merata dan berkelanjutan</p>			
<p>Percepatan infrastruktur Jaringan Internet Pemerintah Intra Pemerintah yang menghubungkan Pemerintah Kabupaten dengan Distrik dan Kampung mendukung Implementasi Sistem</p>	<p>Tersedianya infrastruktur Jaringan Internet Pemerintah Intra Pemerintah dan Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berupaya menyediakan kesiapan Infrastruktur TIK sebagai Sarana dan Prasarana Telekomunikasi dan Informasi yang menjadi salah satu kebutuhan dasar dalam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengusulkan kepada BAKTI-KEMKOMINFO untuk mengadakan dan menambah kapasitas layanan BTS Telephone Seluler yang dapat mengcover wilayah Kabupaten Boven Digoel dengan</li> </ol>

<p>Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pusat Data (Data Center / Distarter Recovery Center).</p>		<p>elayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.</p> <p>2. Peningkatan Layanan BTS Telephone Seluler, Akses Internet dan Desa Broadband Terpadu.</p>	<p>sinyal GSM/3G/4G Komunikasi Data.</p> <p>2. Mengusulkan ke BAKTI-KEMKOMINFO untuk ketersediaan Akses Internet di Balai Kampung, Pusat Layanan Kesehatan, tempat peribadatan dan Sekolah-sekolah.</p> <p>3. Mengusulkan ke BAKTI-KEMKOMINFO untuk peningkatan Desa Braodband Terpadu.</p> <p>4. Mengusulkan ke Pemerintah Provinsi untuk ketersediaan Infrastruktur IndiHOME mendukung Layanan IndiHOME dan WiFi ID di tempat-tempat pusat layanan umum dan peribadatan.</p> <p>5. Percepatan kesiapan infrastruktur TIK dengan mengalokasikan anggaran Interkoneksi Jaringan Internet Pemerintah Intra Pemerintah yang menghubungkan Kabupaten, Distrik dan Kampung.</p>
---	--	---	---

Misi ke-4 : Meningkatkan stabilitas dan kualitas peranan Boven Digoel sebagai daerah perbatasan Papua Selatan yang maju dan berdaulat			
Percepatan infrastruktur Jaringan Internet Pemerintah Intra Pemerintah yang menghubungkan Pemerintah Kabupaten dengan Distrik dan Kampung mendukung Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pusat Data (Data Center / Distarter Recovery Center).	Tersedianya infrastruktur Jaringan Internet Pemerintah Intra Pemerintah dan Masyarakat	Meningkatkan kesiapan Infrastruktur TIK di Kabupaten Boven Digoel sebagai daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) untuk Layanan BTS Telephone Seluler, Akses Internet dan Desa Broadband Terpadu.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan kesiapan infrastruktur TIK dengan mengalokasikan anggaran Interkoneksi Jaringan Internet Pemerintah Intra Pemerintah yang menghubungkan Kabupaten, Distrik dan Kampung, sehingga melalui BTS Telephone Seluler dan Akses Internet dapat digunakan masyarakat untuk mengakses e-Government Layanan Administrasi Pemerintah ataupun Layanan Publik dapat terselenggara dengan efektif dan efisien.</li> <li>2. Mendukung mempercepat pertumbuhan ekonomi, perdagangan dan jasa perhubungan.</li> </ol>
Peningkatan Pelayanan Informasi dan komunikasi publik.	Layanan informasi dan komunikasi publik	Memberikan layanan informasi pembangunan kepada masyarakat yang bersifat edukatif, dengan memanfaatkan sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan desiminasi informasi dan komunikasi publik.</li> <li>2. Memberikan layanan melalui media informasi</li> </ol>

		teknologi informatika dan media informasi milik pemerintah untuk layanan komunikasi publik yang menyentuh hingga masyarakat perbatasan RI-PNG.	milik pemerintah (Web Site, RRI, Televisi, Mobil PUSPITA, Bulletin Suara Boven Digoel, Media Social, dll).
Misi ke-5 : Membangun aparatur birokrasi yang berkarakter dalam memberi pelayanan yang prima pada masyarakat.			
Percepatan infrastruktur Jaringan Internet Pemerintah Intra Pemerintah yang menghubungkan Pemerintah Kabupaten dengan Distrik dan Kampung mendukung Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pusat Data (Data Center / Distarter Recovery Center).	Tersedianya infrastruktur Jaringan Internet Pemerintah Intra Pemerintah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesiapan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektrinik (SPBE).</li> <li>2. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).</li> <li>3. Penguatan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance menuju Smart e-Government)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan pengalokasikan anggaran Interkoneksi Jaringan Internet Pemerintah Intra Pemerintah yang menghubungkan Kabupaten, Distrik dan Kampung.</li> <li>2. Transformasi Digitalisasi Layanan Pemerintah ke dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.</li> <li>3. Mengalokasikan dana pelatihan persiapan SDM Aparatur yang handal secara pendidikan formal ataupun non-formal di Bidang TIK sebagai pelaksana tata kelola birokrasi SPBE.</li> <li>4. Mengalokasikan dana sertifikasi GCIO Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV</li> </ol>

			Tim SPBE Kab. Boven Digoel.
--	--	--	--------------------------------

## **B. Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel.**

### **B.1 Tujuan.**

Tujuan yang telah dirumuskan untuk dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah :

- a. Percepatan Infrastruktur Jaringan Internet Pemerintah Intra Pemerintah yang menghubungkan Pemerintah Kabupaten dengan Distrik dan Kampung mendukung Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pusat Data (Data Center / Disaster Recovery Center).
- b. Implementasi Pola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- c. Pengelolaan dan pengembangan Portal Web Site Kabupaten Boven Digoel dalam implementasi SPBE.
- d. Penyiapan Data Sectoral Statistik Daerah terintegrasi menuju Satu Data Boven Digoel, mendukung perencanaan pembangunan.
- e. Penguatan komunikasi yang efektif dengan dukungan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- f. Peningkatan Pelayanan Informasi dan komunikasi publik.
- g. Penerapan persandian negara pada strategi sistem keamanan data dan informasi.
- h. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang profesional di Bidang Komunikasi dan Informatika.

### **B.2 Sasaran.**

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan sasaran yang harus dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Adapun sasaran tersebut sebagai berikut :

- a. Tersedianya infrastruktur Jaringan Internet Pemerintah Intra Pemerintah di 36 OPD.
- b. Tersedianya infrastruktur Jaringan Internet Pemerintah Intra Pemerintah di 19 Distrik dan 112 Kampung.
- c. Tersedianya infrastruktur Room Server pada Pusat Data yang terstandardisasi dengan Sistem Keamanan Data dan Informasi sesuai SNMKI.

- d. Rutinitas ketersediaan Kapasitas Bandwidth 300 Mbps Medio Fiber Optik mendukung Jaringan Internet Pemerintah Intra Pemerintah dan Pusat Data, serta Bandwidth BackUp V-Sat.
- e. Kapasitas Listrik PLN dan BackUp Genset Pembangkit Tenaga Listrik pendukung Pusat Data.
- f. Rutinitas ketersediaan pembiayaan domain dan web hosting serta Data Statis pada Web Site Kabupaten Boven Digoel.
- g. Implementasi Aplikasi e-Government
- h. Pengadaan Aplikasi e-Government
- i. Pengembangan Aplikasi SIMDATIK menuju Satu Data Boven Digoel.
- j. Ketersediaan Data Sektoral Statistik Daerah
- k. Pengaktifan Forum Data Kabupaten Boven Digoel.
- l. Pengaktifan PPID (Pejabat Pengelola Informasi Daerah)
- m. Mampu mengeleminir isu-isu hoaks dan perbaikan citra layanan pemerintah daerah.
- n. Ketersediaan referensi, waktu, koordinasi dan pengetahuan penyusunan Naskah Sambutan Pimpinan Daerah.
- o. Layanan Informasi dan Komunikasi Publik.
- p. Ketersediaan Informasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.
- q. layanan informasi dan komunikasi publik melalui pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat.
- r. Layanan media informasi dan komunikasi publik.
- s. Menerapkan persandian negara terhadap tata naskah dinas dan tanda tangan elektronik.
- t. Strategi sistem keamanan data dan informasi pusat data.
- u. Pengembangan SDM Aparatur untuk Penata Usahaan Keuangan Daerah dan Aset.
- v. Pengembangan SDM Aparatur sesuai Beban Jabatan Struktural.
- w. Pengembangan SDM Aparatur terkait Manajemen SPBE.
- x. Pengembangan SDM Aparatur Bidang Penyelenggaraan e-Government.
- y. Pengembangan SDM Aparatur Bidang Komunikasi Informasi Publik.
- z. Pengembangan SDM Aparatur Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
- aa. Pengembangan SDM Aparatur Bidang Persandian Negara dan Statistik.
- bb. Pengembangan SDM Masyarakat Bidang TIK untuk Ekonomi Creative.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel untuk 5 Tahun, dapat kami sampaikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Percepatan infrastruktur Jaringan Internet Pemerintah Intra Pemerintah yang menghubungkan Pemerintah Kabupaten dengan Distrik dan Kampung mendukung Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pusat Data (Data Center / Distarter Recovery Center).	Tersedianya infrastruktur Jaringan Internet Pemerintah Intra Pemerintah di 36 OPD.	Tersedia Jaringan Kabel Fiber Optik Tahap-I di 8 OPD.
			Tersedia Jaringan Kabel Fiber Optik Tahap-II di 16 OPD.
			Tersedia Jaringan Kabel Fiber Optik Tahap-III di 14 OPD.
		Tersedianya infrastruktur Jaringan Internet Pemerintah Intra Pemerintah di 19 Distrik dan 112 Kampung.	Tersedia V-Sat Dedicated di 19 Distrik.
			Tersedia V-Sat Dedicated di 97 Kampung.
			Tersedia Jaringan Kabel Fiber Optik di 5 Kampung.
		Tersedianya infrastruktur Room Server pada Pusat Data yang terstandarisasi dengan Sistem Keamanan Data dan Informasi sesuai SNMKI.	Kelayakan Infrastruktur Pusat Data
		Rutinitas ketersediaan Kapasitas Bandwidth 300 Mbps Medio Fiber Optik mendukung Jaringan Internet Pemerintah Intra Pemerintah dan Pusat Data, serta Bandwidth BackUp V-Sat.	Kecukupan Bandwidth Utama Kapasitas dimulai dari 300 Mbps Medio Fiber Optik CIR 1:1 Bandwidth BackUp V-Sat Dedicated Kapasitas 20 Mbps.
		Kapasitas Listrik PLN dan BackUp Genset Pembangkit Tenaga Listrik pendukung Pusat Data.	Ketersediaan Genset Listrik BackUp Listrik PLN pada Pusat Data.

2.	Pengelolaan dan pengembangan Portal Web Site Kabupaten Boven Digoel dalam implementasi SPBE.	Rutinitas ketersediaan pembiayaan domain dan web hosting serta Data Statis pada Web Site Kabupaten Boven Digoel.	Rutin Pembiayaan Domain, Sub-Domain dan Web Hosting Web Site Kabupaten Boven Digoel.
			Pengelolaan data statis Web.
3.	Implementasi Pola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Implementasi Aplikasi e-Government	Integrasi Server Aplikasi e-Government di Pusat Data.
		Pengadaan Aplikasi e-Government	Adanya Aplikasi e-Office Tata Naskah Dinas, dll.
		Pengembangan Aplikasi SIMDATIK menuju Satu Data Boven Digoel.	Integrasi dan Penambahan Fitur Analytical dengan Artificial Intelligence.
4.	Data Sectoral Statistik Daerah terintegrasi menuju Satu Data Boven Digoel, mendukung perencanaan pembangunan.	Ketersediaan Data Sectoral Statistik Daerah	Dokumen dan digital (Buku Dalam Angka dan DVD Interaktif Multimedia).
		Pengaktifan Forum Data Kabupaten Boven Digoel.	Kontribusi rutinitas per-tahun para Wali-Wali Data dalam mengumpulkan data sektoral statistik daerah.
		Pengaktifan PPID (Pejabat Pengelola Informasi Daerah)	Peran PPID sesuai peraturan perundangan.
5.	Penguatan komunikasi yang efektif dengan dukungan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.	Mampu mengeleminir isu-isu hoaks dan perbaikan citra layanan pemerintah daerah.	Efektifitas Peran HUMAS dalam BAKOHUMAS dan Pemanfaatan Media Komunikasi Milik Pemerintah.
		Ketersediaan referensi, waktu, koordinasi dan pengetahuan penyusunan Naskah Sambutan Pimpinan Daerah	Efektifitas dan profesionalisme penyiapan Naskah Sambutan Pimpinan Daerah
6.	Peningkatan Pelayanan Informasi dan komunikasi publik.	Layanan Informasi dan Komunikasi Publik.	Tercover desiminasi informasi dan komunikasi publik melalui media informasi milik

			pemerintah.
		Ketersediaan Informasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.
		layanan informasi dan komunikasi publik melalui pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat.	Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat.
		Layanan media informasi dan komunikasi publik	Optimalisasi Layanan Video Conference, Peliputan Report Agenda Daerah dan Live Streaming.
7.	Penerapan persandian negara pada strategi sistem keamanan data dan informasi.	Menerapkan persandian negara terhadap tata naskah dinas dan tanda tangan elektronik.	Penggunaan tanda tangan elektronik dan tata naskah dinas elektronik.
		Strategi sistem keamanan data dan informasi pusat data.	Sertifikasi kelayakan Pusat Data dengan ISO 27001;2014 dari BSSN.
8.	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang profesional di Bidang Komunikasi dan Informatika.	Pengembangan SDM Aparatur untuk Penata Usahaan Keuangan Daerah dan Aset.	Jumlah SDM Peningkatan Skill dan Pengetahuan Bidang Penata Usahaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Asset Dinas.
		Pengembangan SDM Aparatur sesuai Beban Jabatan Struktural.	Jumlah Diklat Struktural PIM II, PIM III dan PIM IV
		Pengembangan gan SDM Aparatur terkait Manajemen SPBE.	Jumah SDM Pelatihan GCIO (Government Chief Information Office).
		Pengembangan gan SDM Aparatur Bidang Penyelenggaraan e-Government	Jumlah SDM Pelatihan Jaringan Internet dan Aplikasi e-Government.
		Pengembangan gan	Jumlah SDM Pelatihan

	SDM Aparatur Bidang Komunikasi Informasi Publik	Kehumasan dan Pengelolaan Web Site.
	Pengembangan SDM Aparatur Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.	Jumlah SDM Pelatihan pemanfaatan teknologi informatika dan pengelolaan media informasi.
	Pengembangan SDM Aparatur Bidang Persandian Negara dan Statistik.	Jumlah SDM Pelatihan penerapan persandian negara dan pengelolaan data statistik sektoral.
	Pengembangan SDM Masyarakat Bidang TIK untuk Ekonomi Creative.	Jumlah masyarakat yang mengikuti Pengembangan SDM Ekonomi Creative.

### C. Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel.

Adapun strategi dan kebijakan dari program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran prioritas RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 adalah :

**Tabel 2.3**  
**Strategi dan Arah kebijakan**

Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan sinergitas antar OPD di Bidang Pendidikan dan Kesehatan berbasis elektronik dengan pemanfaatan e-Learning dan e-Government.	1. Mengalokasikan anggaran percepatan pembangunan infrastruktur Jaringan Internet Pemerintah Intra Pemerintah interkoneksi 36 OPD.
2. Memperkuat penyediaan akses internet di sekolah-sekolah.	2. Mengusulkan ke BAKTI-KEMKOMINFO pengadaan dan penambahan kapasitas Akses Internet di Sekolah-Sekolah.
3. Keaktifan Domain Web Site sebagai Media Info Pemerintah untuk mengakses e-Government, terutama layanan OPD Bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat	3. Mengalokasikan anggaran percepatan pembangunan infrastruktur Jaringan Internet Pemerintah Intra Pemerintah interkoneksi 19 Distrik dan 112 Kampung. 4. Mengusulkan ke BAKTI-KEMKOMINFO pengadaan dan penambahan kapasitas Akses Internet di Sekolah-Sekolah.
4. Memperkaya konten-konten layanan pendidikan di OPD	3. Memberi Kualitas Layanan OPD Bidang Pendidikan dalam

Bidang Pendidikan	<p>Web Site.</p> <p>4. Bersinergi dengan OPD Bidang Pendidikan untuk konten-konten layanan pendidikan yang berkualitas.</p>
<p>5. Pemanfaatan Data Sektoral Statistik Daerah untuk mengetahui Pendidikan di Kabupaten Boven Digoel dan membuat perencanaan.</p> <p>6. Peningkatan Jumlah SDM Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan Bidang TIK.</p>	<p>3. Bersinergi dengan Wali Data OPD dalam pengumpulan dan pengolahan data secara rutin setiap tahunnya.</p> <p>4. Mengalokasikan anggaran pembuatan dokumen dan digital pengumpulan dan pengolahan data statistik sektoral daerah setiap tahunnya.</p>
7. Peningkatan Jumlah SDM Masyarakat Pemberdayaan Ekonomi Kreative (e-Commercs	Mengalokasikan anggaran rutin pelatihan SDM Aparatur Bidang TIK.
8. Meningkatkan llerasi Pemanfaatan Infrastruktur TIK kearah Pemberdayaan Ekonomy Creative.	Mengalokasikan anggaran rutin pelatihan SDM Masyarakat Pemberdayaan Ekonomi Kreative ke arah Pelaku Usaha StartUp.
	<p>5. Mengalokasikan anggaran percepatan pembangunan infrastruktur Jaringan Internet Pemerintah Intra Pemerintah interkoneksi 36 OPD.</p> <p>6. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).</p> <p>7. Mengusulkan ke BAKTI-KEMKOMINFO pengadaan dan penguatan kapasitas Akses Internet dan BTS Telephone Seluler di Kabupaten Boven Digoel.</p> <p>8. Mengalokasikan anggaran bersinergi dengan Distrik dan Kampung serta Lintas Sektoral dengan OPD terkait melaksanakan sosialisasi, pelatihan, workshop, dll untuk memotivasi para pelaku usaha baik perorangan, kelompok hingga UMKM dapat meningkat menjadi StartUp Daerah dengan mengelola potensi di centra-centra produksi menjadi komoditas unggulan daerah.</p>
3. Meningkatkan sinergitas antar OPD di Bidang Pertanian, Perikanan dan Kepariwisataan	6. Mengalokasikan anggaran percepatan pembangunan infrastruktur Jaringan Internet

<p>berbasis elektronik dengan pemanfaatan e-Learning, e-Commercs dan e-Government dengan Pemerintah Distrik dan Kampung.</p> <p>4. Meningkatkan literasi Pemanfaatan Infrastruktur TIK kearah Pemberdayaan Ekonomy Creative.</p>	<p>Pemerintah Intra Pemerintah interkoneksi 19 Distrik dan 112 Kampung.</p> <p>7. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menghubungkan Distrik dan Kampung.</p> <p>8. Mengusulkan ke BAKTI-KEMKOMINFO pengadaan dan penguatan kapasitas Akses Internet dan BTS Telephone Seluler di Kabupaten Boven Digoel.</p> <p>9. Mengalokasikan anggaran bersinergi dengan Distrik dan Kampung serta Lintas Sektoral dengan OPD terkait melaksanakan sosialisasi, pelatihan, workshop, dll untuk memotivasi para pelaku usaha baik perorangan, kelompok hingga UMKM dapat meningkat menjadi StartUp Daerah dengan mengelola potensi di centra-centra produksi menjadi komoditas unggulan daerah.</p> <p>10. Memanfaatkan penjualan market place dari StartUp/Unicorn Indonesia serta Internet Of Things (IoT) dengan menggunakan teknologi informatika.</p>
<p>3. Keaktifan Domain Layanan Web Site sebagai Media Info Pemerintah untuk mengakses e-Government, terutama layanan OPD Bidang Pertanian, Perikanan dan Kepariwisataaan.</p> <p>4. Menggunakan Web Site Kabupaten Boven Digoel dari Level-Informatif, Interaksi, Transaksional hingga terintegrasi.</p>	<p>5. Mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan domain Web Site Kab. Boven Digoel.</p> <p>6. Implementasi SPBE dengan Layanan OPD memanfaatkan Web Site secara optimal.</p> <p>7. Bersinergi dengan OPD terkait untuk mempromosikan potensi daerah di Web Site dengan Data dan Informasi ataupun visualisasi, membantu mendatangkan investor.</p> <p>8. Bersinergi dengan pelaku usaha dan OPD terkait untuk menjual mempromosi produk-produk unggulan yang berkualitas.</p>
<p>2. Pemanfaatan Data Sektoral Statistik Daerah untuk mengetahui potensi-potensi daerah yang dapat dikembangkan ke arah komoditas unggulan dan membuat perencanaan</p>	<p>3. Bersinergi dengan Wali Data OPD dalam pengumpulan dan pengolahan data secara rutin setiap tahunnya, terutama terkait potensi daerah di bidang pertanian, perikanan dan kepariwisataaan.</p> <p>4. Mengalokasikan anggaran</p>

<p>pembangunan.</p>	<p>pembuatan dokumen dan digital pengumpulan dan pengolahan data statistik sektoral daerah setiap tahunnya.</p>
<p>3. Memberikan layanan data dan informasi kepada masyarakat yang bersifat edukatif.</p> <p>4. Memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi informatika untuk layanan komunikasi publik.</p>	<p>5. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan desiminasi informasi dan komunikasi publik.</p> <p>6. Memberikan layanan melalui media informasi milik pemerintah.</p> <p>7. Mengalokasikan anggaran layanan peliputan dan reportasi progres pengelolaan potensi daerah menjadi produk unggulan secara virtual dan dokumentasi digital di centra-centra produksi.</p> <p>8. Mengalokasikan anggaran pembinaan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang mengelola potensi Pertanian, Perikanan dan Kepariwisataaan.</p>
<p>3. Berupaya menyediakan kesiapan Infrastruktur TIK sebagai Sarana dan Prasarana Telekomunikasi dan Informasi yang menjadi salah satu kebutuhan dasar dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.</p> <p>4. Peningkatan Layanan BTS Telephone Seluler, Akses Internet dan Desa Broadband Terpadu.</p>	<p>6. Mengusulkan kepada BAKTI-KEMKOMINFO untuk mengadakan dan menambah kapasitas layanan BTS Telephone Seluler yang dapat mengcover wilayah Kabupaten Boven Digoel dengan sinyal GSM/3G/4G Komunikasi Data.</p> <p>7. Mengusulkan ke BAKTI-KEMKOMINFO untuk ketersediaan Akses Internet di Balai Kampung, Pusat Layanan Kesehatan, tempat peribadatan dan Sekolah-sekolah.</p> <p>8. Mengusulkan ke BAKTI-KEMKOMINFO untuk peningkatan Desa Braodband Terpadu.</p> <p>9. Mengusulkan ke Pemerintah Provinsi untuk ketersediaan Infrastruktur IndiHOME mendukung Layanan IndiHOME dan WiFi ID di tempat-tempat pusat layanan umum dan peribadatan.</p> <p>10. Percepatan kesiapan infrastruktur TIK dengan mengalokasikan anggaran Interkoneksi Jaringan Internet Pemerintah Intra Pemerintah yang menghubungkan Kabupaten,</p>

	Distrik dan Kampung.
Meningkatkan kesiapan Infrastruktur TIK di Kabupaten Boven Digoel sebagai daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) untuk Layanan BTS Telephone Seluler, Akses Internet dan Desa Broadband Terpadu.	<p>3. Percepatan kesiapan infrastruktur TIK dengan mengalokasikan anggaran Interkoneksi Jaringan Internet Pemerintah Intra Pemerintah yang menghubungkan Kabupaten, Distrik dan Kampung, sehingga melalui BTS Telephone Seluler dan Akses Internet dapat digunakan masyarakat untuk mengakses e-Government Layanan Administrasi Pemerintah ataupun Layanan Publik dapat terselenggara dengan efektif dan efisien.</p> <p>4. Mendukung mempercepat pertumbuhan ekonomi, perdagangan dan jasa perhubungan.</p>
Memberikan layanan informasi pembangunan kepada masyarakat yang bersifat edukatif, dengan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi informatika dan media informasi milik pemerintah untuk layanan komunikasi publik yang menyentuh hingga masyarakat perbatasan RI-PNG.	<p>3. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan desiminasi informasi dan komunikasi publik.</p> <p>4. Memberikan layanan melalui media informasi milik pemerintah (Web Site, RRI, Televisi, Mobil PUSPITA, Bulletin Suara Boven Digoel, Media Social, dll).</p>
<p>4. Kesiapan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).</p> <p>5. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).</p> <p>6. Penguatan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance menuju Smart e-Government)</p>	<p>5. Percepatan pengalokasikan anggaran Interkoneksi Jaringan Internet Pemerintah Intra Pemerintah yang menghubungkan Kabupaten, Distrik dan Kampung.</p> <p>6. Transformasi Digitalisasi Layanan Pemerintah ke dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.</p> <p>7. Mengalokasikan dana pelatihan persiapan SDM Aparatur yang handal secara pendidikan formal ataupun non-formal di Bidang TIK sebagai pelaksana tata kelola birokrasi SPBE.</p> <p>8. Mengalokasikan dana sertifikasi GCIO Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV Tim SPBE Kab. Boven Digoel.</p>

Untuk mencapai visi dan misi maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 Tahun.

Tujuan dan Progam yang telah dirumuskan oleh Dinas KOMINFO Kabupaten Boven Digoel adalah sebagai berikut:

**Misi Pertama**

Peningkatan sarana dan prasarana jaringan internet dalam rangka pelayanan publik

TUJUAN	PROGRAM
a. Percepatan Infrastruktur Jaringan Internet Pemerintah Intra Pemerintah yang menghubungkan Pemerintah Kabupaten dengan Distrik dan Kampung mendukung Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pusat Data (Data Center / Distarter Recovery Center). b. Implementasi Pola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik c. Pengelolaan dan pengembangan Portal Web Site Kabupaten Boven Digoel dalam implementasi SPBE.	a. Program Aplikasi Informatika

**Misi Kedua**

Meningkatkan Koordinasi dan pendayagunaan media teknologi komunikasi dan informasi dalam rangka pelayanan publik yang lebih luas, adil dan merata.

TUJUAN	PROGRAM
a. Penguatan komunikasi yang efektif dengan dukungan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. b. Peningkatan Pelayanan Informasi dan komunikasi public	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

**Misi Ketiga**

Peningkatkan penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral.

TUJUAN	PROGRAM
a. Penyiapan Data Sectoral Statistik Daerah terintegrasi menuju Satu Data Boven Digoel, mendukung perencanaan pembangunan. b. Penerapan persandian negara pada strategi sistem keamanan data dan informasi.	1. Progam Penyelenggaraan Statistik Sektoral

## Misi Keempat

Peningkatan Urusan Pemerintah Daerah

TUJUAN	PROGRAM
a. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang profesional di Bidang Komunikasi dan Informatika.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

## 2.2 Program

Ikhisar Program yang hendak dicapai pada tahun 2023 dapat di jabarkan sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Program, Indikator kinerja, dan target**

No.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</li><li>- Administrasai Keuangan Perangkat Daerah</li><li>- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</li><li>- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</li><li>- Administrasi Umum Perangkat Daerah</li><li>- Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah</li><li>- Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li><li>- Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah</li></ul>	2 Keg 3 Keg 1 Keg 3 Keg 7 Keg 2 keg 3 keg 3 keg
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten</li></ul>	4 Keg
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten</li></ul>	3 Keg

4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	- Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	1	Keg
---	--	---	---	-----

### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan kesepakatan perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran. Dengan mengacuh pada rencana strategis tahun 2021-2025 Diskominfo Kabupaten Boven Digoel dan sumber daya anggaran yang ada, diskominfo boven digoel telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2023 yang berlangsung selama satu tahun anggaran. Adapun rincian perjanjian kinerja selama tahun 2023

**Tabel 2.6**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen
2	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 laporan
3	Penyajian gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	33 Orang/ bulan
4	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah keuangan laporan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan
5	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan /triwulan/semester/ SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	1 Laporan

6	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1 Laporan
7	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	2 Paket
8	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 Orang
9	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	6 orang
10	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket
11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket
12	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket
13	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket
14	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan	48 Dokumen
15	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	2 laporan
16	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	25 Laporan
17	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	20 unit
18	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit
19	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan jasa surat menyurat	1 Laporan
20	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 laporan
21	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum	12 laporan

		kantor yang disediakan	
22	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tidak dilaksanakan	Tidak ada anggaran
23	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tidak dilaksanakan	Tidak ada anggaran
24	Pemeliharaan atau rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	Tidak dilaksanakan	Tidak ada anggaran
25	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	4 Dokumen
26	Pelayanan informasi publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	5 dokumen
27	Kemitraan dengan pemangku kepentingan	Jumlah dokumen kemitraan dengan pemangku kepentingan	1 Dokumen
28	Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	8 Orang
29	Penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	3 Dokumen
30	Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	37 unit
31	Pengembangan dan pengelolaan ekosisten kabupaten /kota cerdas dan kota cerdas	Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city	2 Dokumen
32	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan , pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan , pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	5 Dokumen

Total anggaran diskominfo kabupaten boven digoel pada tahun 2023 sebesar Rp.13.481.333.108 (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.7**  
**Program dan Anggaran**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten boven digoel	Rp. 6.746.527.590	
2	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Rp. 1.799.912.200	
3	Program Pengelolaan aplikasi informatika	Rp. 4.723.904.318	
4	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Rp. 210.989.000	
Total Anggaran		Rp.13.481.333.108	

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan Hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak – pihak yang berwenang menerima pelaporan Akuntabilitas / pemberi amanah.

Diskominfo kabupaten Boven Digoel sebagai pengemban amanah masyarakat boven digoel melaksanakan kewajiban Akuntabilitas melalui penyajian laporan akuntabilitas kinerja yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) dan Reformasi Birokrasi (RB) No.53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing –masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra tahun 2021-2025 maupun rencana kerja tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk Visi dan Misi Pemerintah kabupaten Boven Digoel.

Berdasarkan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten boven digoel berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan/kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) dan Reformasi Birokrasi (RB) No.53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah).

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel Tahun 2023 dilaporkan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dinas komunikasi dan informatika kabupaten boven digoel selama tahun 2023 dengan menggunakan Skala Ordinal. Untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Skala Ordinal**

Nomor	Jumlah Nilai	Kategori
1	$91 \geq$	Sangat berhasil
2	$76 \geq 90$	Berhasil
3	$66 \geq 75$	Cukup berhasil
4	$51 \geq 65$	Kurang berhasil
5	$0 \geq 50$	Tidak berhasil

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk itu pertama kali yang dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran startegis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis dari instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah.

**Tabel 3.2**  
**Indikator Kinerja Utama**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	KET
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Prosentase Pemenuhan Operasional penunjang Perangkat Daerah	94 %	8 Kegiatan(7 terealisasi dan 1 tidak terealisasi)
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Prosentase pelayanan informasi dan komuniaksi Publik	100%	Terealisasi
Program Pengelolaan	Prosentase penyediaan	100%	Terealisasi

Aplikasi Informatika	Aplikasi informatika		
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Prosentase penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%	Terealisasi

### 1. Membandingkan antara targer dan realisasi kinerja tahun ini

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KET
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Prosentase jumlah kegiatan pada penunjang urusan pemerintah daerah yang telah dilaksanakan	8 Kegiatan	7 Kegiatan	94 % (/realisasi / target X100%)	Sangat Berhasil
2	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Prosentase jumlah kegiatan pada pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang telah dilaksanakan	1Kegiatan	1 Kegiatan	100% (realisasi / target x 100%)	Sangat berhasil
3	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Prosentase jumlah pengelolaan Aplikasi informatika	1Kegiatan	1 Kegiatan	100% (realisasi / target x100%)	Sangat berhasil
4	Penyelenggaraan Statistik sektoral	Prosentase jumlah kegiatan pada penyelenggaraan statistik sektoral yang telah dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100% (Realisai/Target x 100%)	Sangat berhasil

#### Analisis perbandingan

Berdasarkan tabel diatas terdapat 4 Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dengan 11 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas

Komunikasi dan Informatika kabupetn Boven Digoel pada tahun 2023, dari 11 Indikator Kinerja tersebut terdapat 10 Indikator Kinerja terlaksanakan dan 1 Indikator kinerja Tidak dilaksanakan

## 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022

N O	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Targ et	realisa si	capai an	targ et	raelisa si	capai an
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Prosentase jumlah kegiatan pada penunjang urusan pemerintah daerah yang telah dilaksanakan	6 Keg	6 Keg	100%	8 Keg	7 Keg	94 %
2	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Prosentase jumlah kegiatan pada pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang telah dilaksanakan	1 Keg	1 Keg	100%	1 Keg	1 Keg	100%
3	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Prosentase jumlah pengelolaan Aplikasi informatika yang telah dilaksanakan	1 Keg	1 Keg	100%	1 Keg	1 Keg	100%
4	Penyelenggaraan Statistik sektoral	Prosentase jumlah kegiatan pada penyelenggaraan statistik sektoral yang telah dilaksanakan	1 Keg	1 Keg	100%	1 Keg	1 Keg	100%

### **Analisis perbandingan :**

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja sasaran Tahun 2023 dengan tahun 2022 dapat dilihat bahwa setiap tahunnya realisasi capaian kinerja mengalami peningkatan dan mencapai target.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan RPJMD yang terdapat dalam Dokumen Renstra

Perbandingan antara realisasi kinerja dibandingkan dengan RPJMD yang terdapat dalam dokumen Renstra

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA %	TARGET RPJMD	CAPAIAN KINERJA RPJMD %
Misi ke-1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing							
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Prosentase jumlah kegiatan pada penunjang urusan pemerintah daerah yang telah dilaksanakan	8 Keg	7 Keg	94 %	100	100%
2	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Prosentase jumlah kegiatan pada pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang telah dilaksanakan	1 keg	1 keg	100%	100	100%
3	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Prosentase jumlah pengelolaan Aplikasi informatika yang telah dilaksanakan	1 keg	1 keg	100 %	100	100%
4	Penyelenggaraan Statistik sektoral	Prosentase jumlah kegiatan pada penyelenggaraan statistik sektoral yang telah dilaksanakan	1 Keg	1 keg	100%	100	100%

#### Analisis Perbandingan

Berdasarkan tabel Perbandingan realisasi Kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis bahwa terjadi peningkatan dan dapat mencapai target rencana Strategis tahun 2021- 2025

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Analisis menunjukkan bahwa kinerja tahun 2023 pada program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dikatakan berhasil karena target dan realisasi sudah terpenuhi dan mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebanyak 6 kegiatan dan tahun 2023 sebanyak 7 kegiatan yang terealisasi.
  - Program Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Analisis menunjukkan bahwa kinerja tahun 2023 pada program Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik dikatakan berhasil karena target dan realisasi sudah terpenuhi dan mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebanyak 3 kegiatan dan tahun 2023 sebanyak 4 kegiatan yang terealisasi
  - Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Analisis menunjukkan bahwa kinerja tahun 2023 pada program Pengelolaan Aplikasi Informatika dikatakan berhasil karena telah memenuhi target dan realisasi, dan mengalami peningkatan pada tahun 2023
  - Program penyelenggaraan statistik sektoral Analisis menunjukkan bahwa Program Penyelenggaraan statistik Sektoral telah berhasil dan mengalami peningkatan ditahun 2023

### 3.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

#### 1. Keuangan

Pelaksanaan kegiatan tahun 2023 Dinas KOMINFO Kabupaten Boven Digoel didasarkan pada anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan dengan PERDA NO 1 Tahun 2015 sedangkan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2023 ditetapkan dengan PERDA NO 1 Tahun 2015.

Ringkasan Anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Dinas KOMINFO Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2023 sesudah perubahan dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
	<b>A. BELANJA DAERAH</b>	
1	Belanja Operasi	Rp.13.259.492.042
	• Belanja Pegawai	- Rp. 3.985.873.079
	• Belanja barang dan Jasa	- Rp. 9.273.618.963
2	Belanja Modal	Rp.221.841.561
	• Belanja Modal Peralatan	- Rp. 221.841.561

	dan mesin	
	Jumlah	Rp. 13.481.333.603
	Total Surplus / DEFISIT	Rp. 13.481.333.603

2. Kepegawaian  
Keadaan pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Boven Digoel per Tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Esalon/ Tingkat an	Pangkat / golongan																jumlah
	IV			III				II				I					
	a	b	c	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d		
II.B	3			9	2	3	5	3	-	6	2						
III.A																	
III.B																4	
IV.A																7	
Staf																22	
Jumlah	3			9	2	3	5	3	-	6	2	-	-	-	-	33	

3. Sarana Penunjang

Sarana penunjang pada Dinas KOMINFO terdiri dari :

1. Gedung Kantor 3 Unit
  2. Kendaraan Roda Empat (4) 2 (Dua) unit ( 1 unit bantuan dari pusat,1 unit rusak berat )
  3. Kendaraan roda dua 20 Unit ( sebagian digunakan oleh pegawai yang di mutasi dari dinas kominfo ke dinas lain )
  4. Sarana penunjang lainnya ( visat, komputer ,inverntaris ).
- *Evaluasi dan analisis dapat dilakukan dengan jalan melakukan analisis yang berkaitan dengan capaian kinerja organisasi tahun berjalan. Dengan melakukan evaluasi atas indikator kinerja mulai dari kegiatan sampai dengan program maka diharapkan dapat memberikan jawaban sebagai berikut:*

**PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEI DINAS KOMINFO KABUPATEN BOVEN DIGOEL**  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN**  
**TAHUN 2023**

NO	PROGRAM	OUTCOME			OUTPUT				ANGGARAN Rp	KE T
		INDIKATOR HASIL	SAT U AN	TAR GET	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	SATU AN	TAR GET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten</b>	- Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	Tersedianya dokumen perangkat daerah dan laporan capaian kinerja	Jumlah kegiatan	Keg	2	10.000.000	
		- Prosentase administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah kegiatan	Keg	3	3.995.873.079	
		- Prosentase Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah	%	100	Terlaksananya barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah kegiatan	Keg	1	5.000.000	
		- Prosentase administrasian kepegawaian perangkat daerah	%	100	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah kegiatan	Keg	3	398.416.000	

		- Prosentase administrasi umum perangkat daerah	%	100	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah kegiatan	Keg	7	1.120.212.550	
		- Prosentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah kegiatan	Keg	2	83.490.561	
		- Prosentase Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah kegiatan	Keg	3	928.692.900	
		- Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	Tidak terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah kegiatan	Keg	3	Tidak teralisasi	
2	<b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	- Prosentase terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik daerah kabupaten	%	100	Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Jumlah kegiatan	Keg	4	1.799.912.200	

3	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	- Prosentase pengelolaan e-Government dilingkup pemerintah kabupaten	%	100	Terlaksananya pengelolaan e-Government	Jumlah kegiatan	Keg	3	4.723.904.813	
4	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	- Prosentase terlaksananya penyelenggaraan statistik sektoral	%	100	Terlaksananya penyelenggaraan statistik sektoral	Jumlah kegiatan	Keg	1	210.989.000	

**PENGUKURAN CAPAIAN SASARAN  
TAHUN 2023**

**INSTANSI : DINAS KOMINFO KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

PROGRAM			REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
URAIAN	INDIKATOR HASIL	TARGET			
1	2	3	4	5	6
<b>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten</b>	- Terwujudnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	8 Kegiatan	7 Kegiatan	98 %	
<b>2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik</b>	- Terwujudnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	
<b>3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	- Terwujudnya Pengelolaan Aplikasi Informatika	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	
<b>4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	- Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN  
TAHUN 2023**

**INSTANSI : DINAS KOMINFO KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

NO	PROGRAM	KEGIATAN					CAPAIAN	KET
		INDIKATOR HASIL	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	- Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Input : Dana Output : penyusunan laporan kinerja Outcome : peningkatan lapoaran kinerja	Rp Keg	10.000.000	10.000.000	100 %	
		- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Input : Dana Output : laporan administrasi keuangan perangkat daerah Outcome : Peningkatan kinerja ASN	Rp Keg	3.995.873.079	3.995.873.079	100%	
		- Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Input : Dana Output : Administrasi Barang Milik Daerah Outcome : Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp Keg	5.000.000	5.000.000	100 %	

		- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Input : Dana Output : Administrasi Kepegawaian Outcome : Tertib administrasi kepegawaian	Rp Keg	398.416.000	398.416.000	100 %	
		- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Input : Dana Output : Administrasi Umum Outcome : Tertibnya adminitrasi Umum	Rp Keg	1.120.212.550	1.120.212.550	100 %	
		- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Input : Dana Output : Barang Meubel Outcome : Peningkatan kinerja	Rp Keg	83.490.561	83.490.561	100 %	
		- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input : Dana Output : jasa pelayanan umum kantor Outcome : Peningkatan kinerja	Rp Keg	928.692.900	928.692.900	100 %	
		- Pemeliharaan Barang Milik daerah	-	-	-	-	-	
2	Program pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Input : Dana Output : Pelayanan Informasi Publik Outcome : Peningkatan kinerja	Rp Keg	1.799.912.200	1.799.912.200	100 %	

3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	- Pengelolaan E-Government Dilingkup Pemerintahan Daerah	Input : Dana Output : Pelayanan e-Government Outcome : Penyediaan Aplikasi	Rp Keg	4.723.904.813	4.723.904.813	100 %	
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Input : Dana Output : hasil pengumpulan data Outcome : Penyediaan Dokumen	Rp Keg	210.989.000	210.989.000	100 %	

### 3.3. Akuntabilitas Kinerja

Laporan akuntabilitas kinerja ( LAKIP ) Dinas KOMINFO Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2023 menggambarkan pencapaian berupa pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya yang mengacu pada Rencana Strategis 2021-2023 Dinas KOMINFO Kabupaten Boven Digoel dalam Tahun 2023 melaksanakan 4 program 11 kegiatan sesuai dengan rencana kinerja Tahun 2023.

Berdasarkan hasil analisis pencapaian kinerja dikaitkan dengan lingkungan internal maupun eksternal maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan mendasar yang merupakan penghambat dalam pencapaian kinerja Dinas KOMINFO Kabupaten Boven Digoel Secara optimal yang harus segera diantisipasi pemecahannya, adalah sebagai berikut:

#### 1. Permasalahan Internal

##### a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur pada Dinas KOMINFO Kabupaten Boven Digoel masih teratas baik kuantitas maupun kualitas, hal ini disebabkan karena rekrutmen pegawai belum disesuaikan dengan kebutuhan setiap SKPD.

Untuk mengatasi kondisi ini diikuti sertakan dalam kegiatan diklat fungsional Bidang Komunikasi dan Informatika di luar Papua

##### b. Etos Kerja

Etos kerja aparatur Dinas KOMINFO masih kurang mendukung terhadap tuntutan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik yang berkaitan dengan komunikasi dan informasi.

#### 2. Strategi Pemecahan Masalah Internal.

Berdasarkan identifikasi terhadap masalah-masalah internal tersebut diatas ,maka strategi dan upaya yang telah dan akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Adanya rekrutmen/mutasi pegawai yang sesuai dengan kebutuhan serta disesuaikan dengan disiplin ilmu yang dimiliki .
- b. Jumlah SKPD di lingkungan pemerintah kabupaten boven digoel cukup banyak sehingga sangat dibutuhkan sarana dan prasarana komunikasi yang memadai dalam pelayanan informasi .
- c. Melakukan peningkatan SDM aparatur KOMINFO secara terus menerus dan berkesinambungan untuk mengikuti pendidikan dan latihan teknis bidang komunikasi dan informasi.
- d. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi

### 3. Permasalahan Eksternal

Permasalahan eksternal yang dihadapi Dinas KOMINFO kabupaten Boven Digoel adalah sebagai berikut ;

1. Kondisi geografis dan topografi kabupaten boven diegoel pada umumnya masih sulit untuk dijangkau sehingga penyebarluasan informasi pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahan belum optimal dipublikasikan kepada masyarakat.
2. Ketersediaan dana untuk pembangunan infrastruktur komunikasi dan informasi belum memadai.
3. Pimpinan skpd belum optimal memanfaatkan sarana komunikasi yang tersedia pada dinas kominfo.

### 4. Strategi Pemecahan Masalah Eksternal.

Berdasarkan identifikasi terhadap masalah-masalah eksternal tersebut diatas maka strategi dan upaya yang akan ditempuh adalah sebagai berikut ;

1. Dengan kondisi geografis dan topografi Kabupaten Boven Digoel yang sulit dijangkau akan diupayakan dengan Kepala-Kepala Distrik untuk melakukan penyebarluasan informasi tentang pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat melalui media buletin ataupun media lainnya.
2. Diperlukan dukungan pimpinan daerah dalam ketersediaan dana untuk pembangunan infrastruktur komunikasi dan informasi yang memadai.
3. Pimpinan SKPD dapat menggunakan sarana komunikasi yang tersedia dalam rangka penyebarluasan informasi program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk diketahui publik.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas KOMINFO Tahun 2023 disampaikan, semoga dapat bermanfaat sebagai salah satu laporan yang dapat digunakan dan alat untuk mengukur serta mengevaluasi sampai sejauh mana kinerja aparat Dinas KOMINFO demi peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang.

Tanah Merah, Januari 2024

Plt. Kepala Dinas  
Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Boven Digoel

MARIA PAYUNGLANGI, S.Sos  
Pembina  
NIP.19721210 200605 2 00

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 sebagaimana yang diuraikan pada bab-bab terdahulu adalah merupakan implementasi dari pelaksanaan Rencana Strategi (RENSTRA) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten boven Digoel. Oleh sebab itu dalam penyusunan LAKIP tahun 2023 dapat dirumuskan beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

#### **Kesimpulan**

1. Dalam penyelenggaraan tugas – tugas bidang komunikasi dan informatika dihadapkan pada adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat, namun dilain pihak masih dihadapkan pada terbatasnya kemampuan / koptensi SDM Aparatur bidang komunikasi dan informasi khususnya yang memiliki latarbelakang pendidikan di bidang teknologi informasi sehingga memudahkan dalam melaksanakan tugas – tugas yang bersifat teknis dibidang informasi dan teknologi (IT).
2. Kondisi geografis daerah kabupaten boven digoel yang sulit menjangkau daerah – daerah distrik dan kampung yang jauh ke pelosok pedalaman, sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas terutama dalam pengembangan jaringan telekomunikasi, pemanfaatan dan peningkatan teknologi informasi khususnya telepon seluler dan internet.
3. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Dinas komunikasi dan informasi kabupaten boven digoel tahun 2023 menunjukkan capaian kinerja sebesar 99 % hal ini menunjukkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas KOMINFO kabupaten boven digoel yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan guna mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran telah dilaksanakan dengan baik sesuai perencanaan yang ada namun hasilnya belum dirasakan maksimal.

#### **Saran – Saran**

1. Untuk kelancaran tugas – tugas bidang komunikasi dan informatika diperlukan adanya penambahan rekrutmen tenaga / pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan dibidang teknologi informasi sehingga memiliki kemampuan dan kompetensi IT yang memadai , selain itu pula perlu adanya pembinaan dan pelatihan bagi para pegawai dalam kegiatan bimbingan teknis baik secara internal maupun eksternal.
2. Guna memaksimalkan kegiatan bidang komunikasi dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis IT (e-Government) dengan dukungan

telepon seluler dan internet yang memadai, maka diperlukan adanya suatu Grand Design untuk pengembangan dan peningkatan infrastruktur teknologi dan keamanan informasi telekomunikasi, selain itu pula diperlukan adanya dukungan dana, sarana dan prasarana yang memadai.

3. Untuk memaksimalkan hasil capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel ditahun – tahun mendatang, maka diperlukan adanya sinkronisasi antara Rencana Strategi (RENSTRA), Rencana Kerja Tahunan (RKT) antara program dan kegiatan yang relevan dengan tupoksi sesuai struktur organisasi kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika (PERDA Nomor.5 Tahun 2016) agar dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan guna menjawab Visi dan Misi Dinas Kominfo terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Periode 2021-2025.

Tanah Merah, Januari 2024

Plt.Kepala Dinas  
Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Boven Digoel

MARIA PAYUNGLANGI, S.Sos  
Pembina  
NIP.19721210 200605 2 001